



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Mei 2017

Halaman: 10

Pemkot Tertibkan Pertanahan

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengintensifkan sosialisasi tertib administrasi pertanahan, baik untuk tanah warga maupun tanah milik pemerintah, agar luasan yang tercatat di dalam sertifikat sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan.

"Terkadang, akibat pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya terjadi perubahan luasan tanah milik warga. Tetapi warga tidak melakukan perubahan di sertifikatnya," kata Hari Setya Wacana, Kepala Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Sabtu (13/5).

Akibat tidak melakukan perubahan luasan tanah di sertifikat, warga tersebut tetap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti luasan yang sebelumnya.

"Jika warga melakukan perubahan luasan di sertifikat, maka warga tersebut bisa mengajukan perubahan data untuk pajak bumi dan bangunan. Tentunya, pajak yang dibayarkan bisa berubah sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005